

## **BAB III**

### **KONSTELASI POLITIK DI ASIA TIMUR**

Dalam bab ini, penulis membagi pembahasan menjadi dua sub bab. Sub bab pertama akan membahas mengenai pertarungan dua ideologi besar di dunia yang berada di kawasan Asia Timur, dan sub bab kedua membahas tentang Aliansi negara-negara kunci yang berada di kawasan Asia Timur. Sub bab pertama akan memaparkan mengenai proses penyebaran serta perkembangan ideologi tersebut di kawasan Asia Timur. Selanjutnya pada sub bab kedua akan memaparkan mengenai negara-negara kunci atau “*major power*” yang menganut ideologi yang sama, dimana hal ini mendorong mereka untuk melakukan aliansi.

#### **A. Awal pertarungan dua ideologi besar di kawasan Asia Timur Era Perang Dingin**

Setelah Perang Dunia II berakhir, tidak berarti dunia benar-benar menjadi aman. Timbul permasalahan lain yang dapat mempengaruhi perpolitikan internasional, yaitu pertentangan antara Blok Barat dibawah pimpinan Amerika Serikat yang demokratis dan kapitalis melawan Blok Timur dibawah pimpinan Uni Soviet yang komunis (Mansbach & Raffery, 2012). Pertentangan ini lebih dikenal dengan Perang Dingin. Dampak nyata dari Perang Dingin ini adalah terpecahnya beberapa negara menjadi dua, seperti Korea, Vietnam dan Jerman, yang negaranya terpecah menjadi dua dengan ideologi yang berbeda. Bagi kedua ideologi tersebut, Asia Timur dianggap sebagai wilayah yang cukup penting yang akhirnya mengakibatkan wilayah ini tak luput dari pertarungan dua ideologi besar

tersebut. Hal ini dikarenakan Asia Timur dalam kacamata geopolitik merupakan titik tumpu yang strategis di wilayah Pasifik, serta wilayah dengan potensi yang besar di dunia.

Titik awal pertarungan dua ideologi besar-dalam hal ini komunisme dan liberalisme- ditandai dengan hilangnya kekuasaan Jepang yang mengakibatkan Jepang harus meninggalkan Semenanjung Korea di tahun 1945, yang kemudian menjadikan rakyat Korea terpecah Karena adanya perubahan kepemimpinan dan ideologi antar mereka sendiri. Hal itulah yang dimanfaatkan oleh kedua negara adikuasa pada waktu itu, Amerika dan Uni Soviet. Keberadaan mereka di Semenanjung Korea tidak lain adalah untuk memantapkan posisi mereka di Semenanjung Korea selama Perang Dingin berlangsung, sehingga mereka dapat selalu survive dan mempertahankan ideologi mereka masing-masing.

Pembagian Semenanjung Korea merupakan salah satu bukti jelas yang diakibatkan persaingan ideologi. Setelah sekutu memenangkan Perang Dunia II, Semenanjung Korea dibagi menjadi dua oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat pada garis lintang 38°. Namun seiring berjalannya waktu, pembagian dua Korea ini merupakan salah satu pemicu timbulnya Perang Korea, dimana sangat jelas terlihat bahwa faktor dominan yang mempengaruhi perang ini adalah adanya persaingan ideologi antara Amerika dan Uni Soviet.

Perang Korea yang berlangsung tahun 1950-1953, dapat dikatakan sebagai perang Komunis dan anti-Komunis. Karena, pada awal perang ini terjadi dikarenakan pihak Uni Soviet ingin menyebarkan ideologi komunisnya di Semenanjung Korea. Uni Soviet mulai memasuki wilayah bagian utara Korea dan kemudian semakin meluaskan ideologinya hampir ke seluruh wilayah. Melihat hal ini, Amerika Serikat mengeluarkan sebuah kebijakan politik luar negeri untuk menduduki Korea bagian Selatan

dalam rangka membendung penyebaran komunis Uni Soviet yang telah terlanjur menyebar di kawasan utara. Kemudian, para petinggi Amerika Serikat pada saat itu membuat sebuah *grand-design* untuk memecah Korea pada garis paralel 38°, dengan alasan untuk tetap mempertahankan posisi Seoul dari pengaruh Uni Soviet yang dirasa semakin kuat di bagian utara Korea (Srivastava, 1982).

Selanjutnya, untuk semakin meneguhkan posisinya di kawasan pendudukan masing-masing, Amerika Serikat dan Uni Soviet saling mendukung berdirinya sebuah rezim di daerah kekuasaan masing-masing. Amerika Serikat pada tanggal 15 Agustus 1948 membentuk *Republic of Korea* (Korea Selatan) yang beribukota di Seoul, dengan presiden Syngman Rhee yang merupakan seorang tokoh anti-Komunis. Sedangkan di lain pihak, Uni Soviet pada tanggal 9 September 1948 membentuk *Democratic People's Republic of Korea* (Korea Utara) yang dipimpin oleh Kim Il Sung yang terpilih melalui Pemilu yang dipimpin oleh pihak Uni Soviet (Djelantik, 2006).

Ketegangan mulai terasa ketika PBB mengeluarkan suatu keputusan dimana keputusan tersebut hanya mengakui bahwa Korea Selatan adalah satu-satunya pemerintahan yang sah di Korea. Akibat keputusan tersebut, timbul kebencian Korea Utara atas Korea Selatan dan Amerika Serikat (Agung, 2012). Korea Utara merasa haknya tidak diakui PBB. Tidak hanya diam, Uni Soviet terus mendukung Korea Utara untuk mendapatkan hak-haknya dan mendapatkan wilayah Korea seluruhnya sebagai respon dari tindakan tersebut. Gagalnya Korea Utara untuk mendapat dukungan melewati simpati negara lain, membuat Korea Utara mengambil jalan kekerasan dengan bantuan dari Uni Soviet. Pada 25 Juni 1950, pecahlah Perang Korea yang ditandai dengan invasi pasukan Korea Utara menuju Korea Selatan melintasi garis perbatasan 38° (Kim, 1993). Pertarungan antara kedua

Korea tersebut berlangsung selama 3 hari, dengan Korea Utara yang berhasil menduduki Seoul dan memaksa pasukan Korea Selatan mundur hingga Pusan (wilayah Korea Selatan), mengakibatkan Presiden Syngman Rhee beserta staff pemerintahannya meninggalkan Seoul dan pindah ke Taejon.

Bagi Amerika, Perang Korea berarti juga perang Amerika, karena Amerika mengetahui bahwa di belakang Korea Utara ada campur tangan Uni Soviet. Tak mau kalah, dengan alasan membendung perluasan ideologi komunis di Asia dan juga membendung kekuatan Korea Utara yang semakin besar, maka Amerika memutuskan untuk membantu Korea Selatan, dengan cara mengusulkan kepada Dewan Keamanan PBB untuk melakukan sidang guna membicarakan permasalahan Korea. Usulan tersebut diterima dan menghasilkan resolusi :

- a. Mendesak Korea Utara agar segera menghentikan perang dan menarik mundur pasukan-pasukannya sampai garis batas 38° Lintang Utara
- b. Memberikan sanksi kepada Korea Utara apabila pihak Korea Utara tidak memperdulikan desakan tersebut, maka PBB dengan para anggotanya akan membantu Korea Selatan.

Tidak hanya itu, Amerika juga mengirimkan pasukan perlindungan ke Korea Selatan pada tanggal 27 Juni 1950. Pasukan ini dipusatkan pada semenanjung seberang laut Jepang. Penempatan pasukan ini merupakan strategi militer Amerika Serikat yang bertujuan untuk membuat bendungan yang kuat disebelah Barat (Laut Kuning), sebelah Selatan (Laut Cina) dan sebelah Timur (Laut Jepang) untuk mengontrol agar Perang Korea tidak semakin meluas.

Pada 26 September 1950, dengan bantuan Amerika Serikat, Seoul dapat kembali direbut pihak Selatan.

Kekalahan pihak Utara dapat juga dikatakan sebagai kekalahan Uni Soviet. Kekalahan Korea Utara ini membuat RRC sebagai sekutu Uni Soviet tidak tinggal diam. Dalam penyerangan ini, pihak Cina mengerahkan 100.000 pasukan termasuk dua divisi yang datang dari Cina utara yang bekerjasama dengan angkatan perang Uni Soviet untuk menyerang balik pihak Selatan. Semenjak kedatangan Cina ke Korea Utara, kemenangan kembali berada di pihak Utara. Kekuatan PBB di Korea, mengalami kekalahan semenjak kedatangan pasukan RRC. Situasi perang yang tidak pernah padam itu mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk mengajukan perundingan untuk menghentikan peperangan. Tawaran ini akhirnya disepakati oleh kedua belah pihak, baik pihak Utara maupun Selatan, yang selanjutnya diadakan serangkaian perundingan dan gencatan senjata.

Perang Korea pada akhirnya berakhir pada tahun 1953, dimana kedua belah pihak mencapai kesepakatan penghentian permusuhan yang ditandatangani pada tanggal 27 Juli 1953, dan Perang Korea berakhir dengan tidak adanya pihak yang menang atau kalah. Akan tetapi, Perang Dingin dikawasan Semenanjung Korea yang diharapkan mereda seiring dengan tercapainya kesepakatan tersebut tidak kunjung terwujud hingga saat ini. Hal tersebut didorong oleh beberapa faktor, diantaranya mengenai perbedaan yang berkaitandengan organisasi dan politik negara kesatuan. Korea Utara menginginkan penyatuan dengan membentuk suatu negara konfederasi. Namun dari pihak Korea Selatan menginginkan terlebur dalam satu negara baru yang demokratis.

Berbicara mengenai pertarungan ideologi di Asia Timur, pihak yang terlibat tidak hanya dua negara Korea saja. Negara kunci atau "*major power*" yang memiliki perbedaan ideologi di kawasan Asia Timur (RRC, Rusia) dan negara adidaya, Amerika tentu terlibat dalam pertarungan ideologi ini. Tidak tertinggal, Jepang, sebagai

negara yang pernah memiliki andil besar dalam Perang Dunia II pun memainkan peran yang cukup besar. Salah satu contohnya adalah keunikan hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Utara. Faktanya, Korea Utara merupakan satu-satunya negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik secara formal dengan Jepang sejak berakhirnya Perang Dunia II, dimana hal ini didorong oleh sikap dari Korea Utara sendiri. Hubungan “tidak normal” antara Jepang dan Korea Utara membuat Perang Dingin semakin “memanas”, yang pada akhirnya membawa kedua negara ini kedalam dua sisi yang berlawanan, yang semakin membuat pertarungan ideologi di Asia Timur semakin membesar.

Awal mula pertarungan ideologi antara kedua negara tersebut terjadi pada tahun 1950-an, dimana telah terjalin hubungan perdagangan dikalangan pebisnis Jepang dan Korea Utara melalui warga Korea Utara yang menetap di Jepang atau biasa disebut dengan *Chosen Soren* (Park, Koh, & Kwak, 1987). Dalam perkembangannya, perdagangan di kalangan pebisnis mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Pada tahun 1957 saja, mencapai angka US\$ 6 Juta dan puncaknya terjadi pada tahun 1964 yang mencapai US\$ 30 Juta. Tetapi angka ini berubah drastis setelah Tokyo menormalisasikan hubungannya dengan Seoul pada tahun 1965, yang membuat volume pertumbuhan perdagangan turun drastis menjadi US\$ 7 Juta pada tahun 1966 (Nester, 1992). Bagi Korea Utara, normalisasi hubungan Jepang dan Korea Selatan tersebut juga berarti Jepang mengakui adanya dua Korea di Semenanjung Korea. Hal ini membuat Korea Utara marah, karena sebenarnya Korea Utara menginginkan adanya reunifikasi dimana hanya ada satu Korea yang berada di bawah kekuasaan Korea Utara.

Puncak dari pertarungan kedua ideologi besar dunia yang terdapat di kawasan Asia Timur terjadi pada saat runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Runtuhnya Uni

Soviet menjadi penanda berakhirnya perang dingin antara kedua ideologi besar tersebut, termasuk di wilayah Asia Timur. Tidak adanya lagi perlawanan dari Uni Soviet menjadikan Amerika Serikat menjadi pihak yang menduduki puncak hirarki global atau biasa disebut sebagai era unipolar. Ada beberapa faktor yang membuat Amerika berhasil dalam memenangkan Perang Dingin, salah satunya didorong oleh kebijakan yang dinamakan *containment policy*, yang mana pada dasarnya inti dari kebijakan ini adalah untuk membendung perluasan paham komunis yang disebar oleh Uni Soviet.

Walaupun Uni Soviet runtuh dan komunis tidak sekuat dulu lagi, namun pada era modern saat ini, percaturan politik di Asia Timur tetap diramaikan oleh pertarungan kedua ideologi tersebut. Rusia, yang disebut-sebut sebagai penerus Uni Soviet masih memiliki peran yang cukup penting di Asia Timur. Sedangkan dua Korea, tetap terbagi menjadi dua kubu, dimana kubu Utara masih tetap berdiri dengan paham Komunisnya dan kubu Selatan dengan paham Liberalis. Jepang yang pada saat Perang Dunia II mengalami kekalahan dari Amerika Serikat tentu memiliki paham yang sama dengan Amerika, karena Amerika memiliki peran yang cukup besar dalam pembangunan kembali negara Jepang pasca perang.

Kekuatan lain yang cukup dapat diperhitungkan di wilayah Asia Timur adalah Republik Rakyat Cina (RRC). Dengan paham komunis yang mereka anut, dan jumlah penduduk yang banyak, serta pertumbuhan ekonomi yang pesat, menjadikan China sebagai suatu negara yang patut diperhitungkan oleh pihak Liberalis.

Konstelasi politik di Asia Timur merupakan percaturan politik yang unik, karena latar belakang yang politikan di wilayah ini yang sangat kental oleh peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu. Dapat dikatakan bahwa kekuatan dua ideologi di wilayah Asia Timur

seimbang, karena di wilayah ini, tidak ada satu ideologi yang lebih banyak dianut oleh negara-negara di kawasan Asia Timur, sehingga kedua ideologi tersebut sama kuat di wilayah ini. Lebih jauh lagi, persamaan ideologi di wilayah ini dapat mendorong kompetisi ataupun akan mendorong aliansi negara-negara di kawasan Asia Timur.

## **B. Aliansi negara-negara kunci di kawasan Asia Timur Pasca Perang Dingin**

Aliansi merupakan salah satu pola kekuasaan dimana negara berusaha mempertahankan keberlangsungan hidup serta menciptakan peluang untuk memajukan kepentingan nasionalnya dengan menyatukan power yang dimiliki terhadap satu atau lebih negara lain yang memiliki kepentingan serupa. Suatu negara dapat membentuk aliansi dengan negara lain, dan dapat bersifat bilateral antara dua negara, ataupun multilateral yang melibatkan lebih dari dua negara yang tergabung dalam suatu aliansi. Selain itu, aliansi cenderung akan terbentuk ketika suatu negara memiliki suatu pemikiran atau ideologi yang sama, dimana hal ini dapat mendorong dan membuat keberhasilan aliansi yang ada menjadi lebih besar.

Setelah berakhirnya Perang Dingin, banyak dari negara-negara di dunia semakin terdorong untuk membangun negaranya, karena pada era pasca Perang Dingin, pertarungan tidak hanya tentang pertarungan ideologi untuk membuktikan ideologi mana yang kuat saja, namun negara akan terdorong untuk mempertahankan keberlangsungan hidup serta memenuhi kepentingan nasionalnya. Adanya hal tersebut mendorong negara melakukan kompetisi satu sama lain, yang mana hal ini juga dapat mendorong negara-negara di dunia untuk melakukan aliansi, baik itu negara besar maupun negara

kecil. Namun, karena aliansi dianggap dapat memudahkan proses kompetisi yang ada, banyak negara di dunia terdorong melakukan aliansi dengan negara lain.

Dalam wilayah Asia Timur sendiri, terdapat banyak bentuk dan macam aliansi yang dilakukan antara negara-negara di kawasan ini. Namun dari sekian banyak aliansi yang ada, aliansi yang paling menonjol adalah aliansi antara Jepang dan Amerika Serikat. Sejarah terbentuknya aliansi Jepang-Amerika Serikat terjadi setelah kekalahan Jepang kepada pihak sekutu pimpinan Amerika Serikat pada 15 Agustus 1945 yang juga menandakan berakhirnya Perang Dunia II. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuat Jepang harus memperbaiki kehancuran yang dideritanya akibat perang melalui perbaikan bidang ekonomi. Untuk memperbaiki perekonomiannya yang hancur karena perang, Jepang menyerahkan pertahanannya kepada Amerika Serikat agar dapat lebih berkonsentrasi dalam membangun perekonomiannya kembali, Sehingga Jepang memperoleh keberhasilan di bidang ekonomi yang membuat Jepang bangkit kembali dari keterpurukan perekonomian dan kembali diperhitungkan di percaturan politik internasional.

Jepang menandatangani perjanjian damai (*peace treaty*) pada September 1951 dengan Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pada saat yang bersamaan, Jepang juga menandatangani perjanjian militer dengan Amerika Serikat (*U.S. - Japan Security Treaty*). Inti dari perjanjian ini adalah bahwa pihak Jepang bersedia dan mengizinkan AS untuk menempatkan kekuatan militernya di Jepang. Perjanjian mulai efektif berlaku pada 28 Februari 1952 bersamaan dengan berakhirnya masa kependudukan sekutu (Amerika Serikat) di Jepang serta kemerdekaan Jepang yang diakhiri dengan perjanjian keamanan dan perdamaian dengan AS.

*Security Treaty* ini menjadi dasar hukum keberadaan kekuatan militer Amerika Serikat di wilayah Jepang dan berfungsi sebagai penjamin keamanan Jepang dari serangan eksternal. Semenjak itu, kebijakan pertahanan Jepang bergantung kepada Amerika Serikat. Perjanjian ini kemudian direvisi dan ditandatangani dengan perjanjian baru, yaitu *Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan*, yang disepakati oleh kedua negara pada tanggal 19 Januari 1960 di Washington DC. Bersama dengan jalannya waktu, ketergantungan Jepang terhadap Amerika Serikat berubah dari sekedar menangkal serangan eksternal menjadi alat deterns. Selama Jepang dapat bergantung kepada militer Amerika Serikat terhadap ancaman eksternal maka SDF yang merupakan tentara bentukan Jepang dapat fokus terhadap ancaman internal.

Sebenarnya, aliansi antara Jepang – Amerika Serikat ini juga didorong oleh faktor ancaman dari Uni Soviet dan ideologinya yang masih berkembang hingga sekarang. Kemampuan Uni Soviet dalam mengembangkan senjata nuklir, kemenangan Komunis Tiongkok, dan pecahnya perang Korea karena perbedaan ideologi komunis yang dianut Korea Utara membuat Asia Timur praktis dengan paham liberalisnya berada dalam kepungan Komunisme. Posisi basis militer Amerika Serikat terbukti menjadi vital bagi Jepang. Amerika Serikat juga sadar akan hal ini, dimana basis militer di Jepang ini pada kemudian hari akan menjadi fokus dalam kebijakan pertahanan Amerika Serikat di Asia Timur. Terbukti, aliansi pertahanan antara Jepang – Amerika Serikat ini bertahan sampai era modern sekarang ini.

Tidak hanya Jepang saja yang melakukan aliansi dengan Amerika, Korea Selatan pun juga melakukan aliansi dengan negara adidaya itu. Aliansi militer Amerika Serikat dengan Korea Selatan bermula dari terbentuknya Korea Selatan sebagai negara setelah terpecah dari Korea

Utara. Setelah akhir Perang Dunia II, semenanjung Korea terbagi dan diduduki oleh Uni Soviet dan pasukan Amerika Serikat. Aliansi antara Amerika Serikat dengan Korea Selatan pada awalnya bertujuan untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman eksternal. Aliansi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat tidak saja menjadi benteng melawan hegemoni Uni Soviet dan China di semenanjung Korea pada waktu itu, akan tetapi juga telah mengindarkan negaranya dari doktrinisasi ideologi komunis yang semakin kuat. Sebagai hasil, Korea selatan telah berpindah dari otoritas rezim kedemokrasi. Tujuan lain aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan adalah membuat Korea Selatan sebagai cerminan dari pasar ekonomi yang sukses dan menjadi penguat demokrasiliberal di Asia timur.

Kawasan Asia Timur merupakan kawasan yang terbentang luas dari utara hingga ke selatan. Namun perbedaan yang mencolok terjadi antara kedua bagian, bagian utara dan bagian selatan kawasan ini. Bagian utara Asia Timur merupakan bagian yang diisi oleh negara-negara yang sangat maju secara perekonomian. Jepang, Cina, dan Korea Selatan merupakan contoh negara-negara di Asia Timur bagian utara yang mapan secara ekonomi. Walaupun maju secara ekonomi, tidak dapat dipungkiri bahwa kawasan Asia Timur ini menyimpan berbagai potensi konflik. Salah satunya adalah konflik Semenanjung Korea yang menyebabkan beberapa negara kurang dapat bekerja sama. Alih-alih mengadakan kerja sama dengan Korea Utara, baik pihak Jepang maupun Korea Selatan masih belum dapat mengadakan kerjasama yang baik dengan negara-negara tersebut. Kerjasama yang baik di sini maksudnya adalah kerjasama tanpa tendensi lain selain dari tujuan kerja sama tersebut. Kerjasama antara negara-negara tersebut sangat sulit terjadi, karena adanya tendensi persaingan militer yang terjadi antara Korea Utara dan Cina dengan Korea Selatan dan Jepang.

Adanya kebijakan aliansi militer Amerika Serikat dan Korea Selatan terhadap Korea Utara selalu diwarnai dengan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Bagi Amerika Serikat, Korea Utara bukan hanya ancaman militer langsung bagi Korea Selatan dan ancaman tidak langsung terhadap Jepang, namun dengan rudal serta pengembangan senjata nuklir itu, Korea Utara juga mengancam keamanan Amerika Serikat karena daya jangkau dari rudal tersebut sangatlah luas. Disisi lain, Korea Utara berusaha mempertahankan diri dari ancaman luar dengan cara mengembangkan nuklir. Namun pada kenyataannya pengembangan senjata nuklir Korea Utara tidak membuat keamanan wilayah Asia Timur menjadi terjamin, malah justru semakin membuat situasi keamanan regional Asia Timur semakin kompleks.

Korea Utara merasa bahwa aliansi pertahanan Amerika Serikat dengan Korea Selatan dan juga Jepang merupakan aliansi yang dapat mengancam keberadaan dan keamanan nasional Korea Utara di kawasan Asia Timur, karena posisinya yang sangat terancam. Korea Utara juga tidak dapat mempercayai Cina sepenuhnya sebagai sekutu--walaupun mereka sama-sama menganut ideologi komunis--dikarenakan Cina memiliki ambisi untuk menjadi kekuatan ekonomi dan militer yang dominan di kawasan Asia Timur.

Terdapat beberapa faktor mengapa aliansi militer Amerika Serikat dan Korea Selatan dipandang sebagai ancaman keamanan di Asia Timur. Pertama, aliansi militer Amerika Serikat dan Korea Selatan dapat memprovokasi peningkatan militer dari negara-negara yang ada di Asia Timur, khususnya negara dengan ideologi yang berbeda dengan negara tersebut. Kedua, aliansi militer Amerika Serikat dan Korea Selatan dapat mendorong adanya pengaturan perimbangan kekuatan di kawasan Asia Timur, dimana Korea Utara selalu berusaha untuk mengembangkan aktivitas nuklirnya sebagai bentuk aksi

dan reaksi atas keadaan keamanan yang tidak menentu di kawasan Asia timur, yang dinilai dapat membahayakan posisi Korea Utara di Asia Timur. Jepang akan tetap melakukan kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat, dengan tujuan untuk menjaga keamanan Jepang serta dapat menjamin perdamaian dan stabilitas di wilayah sekitar Jepang dan China dengan melakukan modernisasi militer untuk memberikan keseimbangan di Asia Timur.

Berbagai tindakan yang dilakukan oleh negara-negara di Asia Timur untuk meningkatkan keamanan negaranya tentu akan berakibat pada munculnya sikap saling meresepo antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Hal tersebut terlihat di mana setiap negara di Asia Timur akan meningkatkan dan mengeluarkan belanja pertahanan yang terus membesar, tetapi justru semakin mendekati ambang perang yang semakin berbahaya dan dilemma keamanan (*Security Dilemma*) di kawasan Asia Timur akan terusterjadi.

*Security Dilemma* tentu saja tidak sesuai dengan konsep *Regional Security*. Konsep ini secara jelas mengatakan bahwa setiap negara di sebuah kawasan wajib menjaga keamanan kawasan tersebut dengan saling bekerja sama dan saling membantu satu sama lain. Akan tetapi yang terjadi di kawasan Asia Timur ini justru sebaliknya. Persaingan militer akibat dari adanya rasa kecurigaan terhadap setiap negara justru akan berpotensi kepada perang dingin. Oleh karena itu tentu saja mempengaruhi stabilitas kawasan serta dapat menjadikan kawasan Asia Timur ini tidak sehat karena ketidakmampuan setiap negara saling bekerja sama untuk menciptakan keamanan regional.

Berikut adalah pandangan dan respon beberapa negara di Asia Timur mengenai adanya aliansi-aliansi negara yang terjadi di wilayah tersebut:

## 1. China

Dalam *National Defense Policy* tahun 2008, China menyatakan bahwa kebijakan pertahanannya murni untuk tujuan defensif saja. China dengan tegas menjelaskan bahwa strategi militernya sebagai sebuah pertahanan aktif, dengan cara mematuhi prinsip-prinsip operasi defensif, *self defense*, dan menyerang hanya ketika telah diserang terlebih dahulu oleh pihak musuh. Selain itu, China juga memastikan tidak akan menggunakan senjata nuklir miliknya untuk menyerang pihak lain pertama kali, mengejar strategi nuklir *self-defensive* dan tidak akan masuk di dalam perlombaan senjata nuklir dengan negara lain.

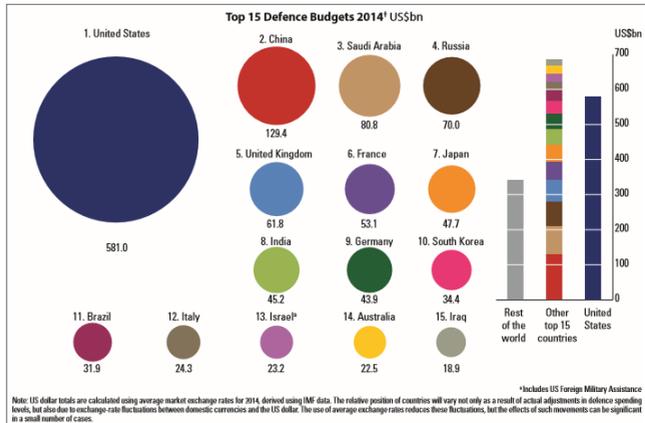
Kecaman atas kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan dan adanya aliansi militer yang dibangun oleh Amerika Serikat dengan Korea Selatan dan Jepang telah membuat Menteri Pertahanan China, Yang Yujun angkat bicara. Dia mengatakan bahwa “Langkah tertentu untuk meningkatkan kehadiran militer dan memperkuat aliansi kami dianggap tidak tepat waktu dan tidak kondusif bagi perdamaian serta stabilitas di kawasan, selain itu Kehadiran kekuatan Amerika Serikat merupakan ancaman keamanan dan membuat rumit keadaan”.

Secaragaris besar, upaya yang dilakukan oleh China guna memberikan keseimbangan di kawasan AsiaTimur ialah dengan cara yang dilakukan secara konsisten, dengan cara China mengalokasikan APBN-nya sebesar 20% untuk kepentingan pembangunan militer dan modernisasi peralatan militer yang dimilikinya sekarang. Sekarang, pihak pemerintah China memposisikan dirinya sebagai negara sedang berkembang, bukan negara maju, yang terus berupaya mencapai kemajuan di segala bidang. Lebih dari itu, China percaya jika momentum ini dapat dipertahankan

hingga tahun 2050, China akan menduduki posisi sebagai negara adidaya kelas menengah. Bahkan sejumlah pakar melihat bahwa China berpeluang menjadi kekuatan terbesar di dunia di masa mendatang (Trabanco, 2009). Dalam kebijakannya, *China's Peaceful Development* atau menurut Amerika Serikat lebih dikenal sebagai '*China Rise*', tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini China mengalami peningkatan yang signifikan, serta mampu mempengaruhi negara-negara di Kawasan Asia-Pasifik untuk bekerja sama di segala bidang dan sektor.

Dilihat dari bidang pertahanannya, Anggaran resmi militer China untuk tahun 2010 adalah \$8,12 miliar, namun Pentagon mengatakan China menghabiskan lebih dari jumlah tersebut. (Report to Congress of the US-China Economic and Security Review Commission, 2011). *Military expenditure* merupakan bagian dari aggregate power karena dapat melihat seberapa besar alokasi pendapatan negara untuk keperluan militer. Meski pemerintah China menegaskan bahwa pengembangan militernya murni hanya untuk alat deterns, tetapi pengeluaran belanja militer di masa damai dalam kurun waktu yang tercatat dari tahun 2011-2014, pada kenyataannya telah menimbulkan keresahan dan kekhawatiran tersendiri bagi AS.

**Gambar III. 1 Anggaran Belanja Militer 2014**



**Sumber : IISS, Military Balance 2014.**

Dari gambar di atas, terlihat bahwa di antara negara-negara lainnya di Kawasan Asia-Pasifik, China merupakan negara dengan anggaran militer terbesar. Namun, apabila melihat hadirnya AS di kawasan tersebut, maka China tetap menduduki satu peringkat di bawah AS. AS membelanjakan dana pertahanannya di tahun 2014 sebesar US\$581 miliar, diikuti China dengan total belanja militer US\$129 miliar.

Batas geografis yang dimiliki oleh suatu negara sangat mempengaruhi besar kecilnya ancaman yang didapat oleh negara tersebut. Semakin dekat suatu negara yang memberikan ancaman, semakin besar ancaman yang di terima. Jika dikaitkan dalam tulisan ini, China dan Amerika Serikat memang tidak berbatasan darat langsung dan dipisahkan dengan Samudera Pasifik. Namun, posisi Pantai Timur China yang mengarah langsung ke Pantai Barat Amerika Serikat memberikan tantangan tersendiri bagi negara adidaya tersebut. Kondisi geografis kedua negara yang saling berhadapan memperbesar peluang adanya

ancaman yang mungkin akan diterima oleh Amerika Serikat. Didukung dengan kemampuan militer yang hingga saat ini terus meningkat, tidak menutup kemungkinan China mampu memberikan ancaman yang besar dan dapat menjadi perhatian khusus bagi AS. Kekuatan militer juga dapat dipandang sebagai penjamin untuk menopang pengaruh politik China di dunia internasional. Terlihat disini bahwa *hardpower* (kekuatan militer) yang dimiliki dan selalu dikembangkan oleh China, sebagai ciri utama realisme yang menjadi salah satu instrument penting, dan selalu digunakan China sebagai upaya untuk meningkatkan pengaruh dalam politik hubungan antar bangsa dalam percaturan politik internasional, terutama di Asia Timur.

Maka untuk dapat menjaga dan mewujudkan kestabilan keamanan di wilayah Asia Timur, dengan jelas China mendorong Korea Utara untuk menghentikan pengembangan senjata nuklirnya, walaupun pada mulanya, China lah yang menjadi tempat Korea Utara untuk “berguru” mengenai nuklir. Hal ini dianggap unik, terutama jika berbicara mengenai aliansi antar negara. China dan Korea Utara merupakan negara dengan ideologi yang sama, yaitu Komunis. Walaupun pada era modern seperti sekarang ini China tidak sepenuhnya menerapkan komunisme diseluruh kehidupan negaranya-walaupun politiknya bernafaskan komunisme, akan tetapi perekonomiannya memiliki nafas liberalisme-, namun jiwa komunisme tetap mengakar di rakyat China. Jika melihat hal tersebut melalui konsep aliansi, maka seharusnya China mendukung pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara karena mereka merupakan “saudara”. Sangat jelas terlihat bahwa keamanan regional menjadi faktor penting yang mendorong China melakukan hal tersebut, walaupun apa yang dilakukan oleh China pada akhirnya membuat hubungan antara China dan Korea Utara tidak seerat dulu lagi, pada saat era perang dingin.

## 2. Korea Utara

Korea Utara merespon aliansi yang dilakukan oleh Amerika, Korea Selatan dan Jepang dengan mengembangkan senjata nuklir sebagai bentuk ancaman langsung (*direct threat*) terhadap aliansi triteral (Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan). Pengembangan program senjata nuklir Korea Utara merupakan tindak lanjut dari tidak berjalannya konstruksi sosial di kawasan Asia Timur, dan sebagai akibat pecahnya perang Korea. Hal tersebut memunculkan persepsi ancaman masing-masing pihak yang bertikai, Korea Utara dan Korea Selatan yang juga melibatkan dua kekuatan global yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dari fenomena tersebut membentuk identitas relasi antar aktor di kawasan Asia Timur menuju kearah pola pemusuhan, termasuk didalamnya Cina yang notabene merupakan sekutu Korea Utara dan Amerika Serikat sebagai aktor di luar kawasan yang mendukung Korea Selatan. Korea utara menjanjikan “tanggapan fisik“ atas latihan militer yang digelar oleh Amerika Serikat dengan Korea Selatan serta Jepang disekitaran kawasan Asia Timur. Komentar ini muncul pada saat menteri luar negeri bertemu di Hanoi, Vietnam, dalam Forum Kawasan ASEAN. Juru bicara delegasi Korea Utara dalam forum tersebut yaitu Ri Tong-il mengatakan “latihan militer bersama Amerika Serikat dan Korea Selatan merupakan contoh dari diplomasi kapal perang pada masa abad 19”, dan dia menambahkan “ini abad baru dan negara-negara Asia membutuhkan perdamaian dan pembangunan, dan DPRK (Korea Utara) juga bergerak kearah tujuan itu”.

Amerika Serikat dan Korea Selatan serta Jepang terus berupaya dalam menyelesaikan kasus nuklir milik Korea Utara. Kedepannya, kedua negara tersebut akan

mendorong untuk diadakannya kembali pembicaraan antara enam pihak (*Six Party Talks*) yang sempat tertunda akibat ketidakjelasan para anggota mengenai kapan akan diadakan kembali. Adanya ketiga negara yang beraliansi tersebut merupakan pihak penggagas yang berperan sebagai pendorong dari pembicaraan enam pihak ini semakin mengindikasikan bahwa aliansi kedua negara tersebut semakin serius untuk menghentikan program nuklir Korea Utara kedepannya, dan juga mempertegas kerjasama dalam memerangi isu-isu keamanan baik di tingkat regional maupun tingkat global.

Menindaklanjuti proses penanganan keamanan di Asia Timur, selain membicarakan mengenai pembicaraan *Six Party Talks* yang sempat tertunda, Amerika secara terang-terangan melakukan latihan militer gabungan dengan Korea Selatan yang dimulai dari akhir Februari hingga April 2012. Latihan militer gabungan ini merupakan tindakan deterrens sekaligus memberikan sinyal kepada Korea Utara, serta bertujuan sebagai bentuk pertahanan bagi Korea Selatan. Sekitar 2.000 prajurit AS ditambah 800 personel tambahan dari luar Korea Selatan didatangkan untuk mengikuti latihan rutin tahunan yang diberi kode *Key Resolve*.

Seperti yang terjadi dengan China dan Korea Utara yang mengalami sedikit pertentangan dalam aliansinya, dalam kubu liberalis, dalam hal ini Jepang dan Korea Selatan juga mengalami hal yang sama. Jika melihat konsep *Regional Security*, kerjasama pertahanan dengan negara tetangga sangatlah wajar dan tidak dapat dihindari. Namun yang terjadi sangatlah berbeda, karena pada saat Korea Utara sedang gencar-gencarnya melakukan pengembangan nuklir, aliansi antara Jepang dan Korea Selatan belum juga membaik. Sebenarnya pimpinan dari kedua belah pihak telah berupaya untuk menormalisasi hubungan kedua negara, dengan cara

perdana menteri Jepang bertandang ke Korea Selatan untuk membicarakan masalah yang terjadi dengan cara berusaha untuk membuat suatu kesepakatan yang nantinya akan membahas mengenai isu yang sangat sensitif bagi kedua negara, terutama isu sejarah kolonialisme mereka. Walaupun baik dari pihak Jepang maupun Korea Selatan melakukan kerjasama militer dengan Amerika Serikat di kawasan Asia Timur, yang dianggap wajar dan tidak dapat dihindari lagi, namun hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan rakyat Korea Selatan dikarenakan adanya kekhawatiran atas pengaruhnya dalam situasi politik Asia Timur yang didorong oleh kerumitan hubungan kedua belah pihak sejak masa lampau, karena hubungan sejarah bilateral sejak masa kuno tetap sangat sensitif. Dengan masih sensitifnya rakyat Korea Selatan mengenai masalah sejarah, maka hubungan Jepang – Korea Selatan yang memiliki ideologi yang sama menjadi renggang. Dendam yang masih tertanam di kalangan rakyat Korea Selatan membuat kedua negara ini sebagai “saudara dekat namun jauh”.

Hal tersebut mendorong Amerika, sebagai negara adidaya sekaligus sebagai sekutu kedua negara tersebut sangat aktif terlibat dalam konstelasi politik di Asia Timur. Walaupun Amerika merupakan aktor intrusif di wilayah Asia Timur, ia terlibat sangat aktif dalam mempertahankan dan memperbaiki hubungan kedua sekutunya tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa aliansi triteral antara Jepang, Korea Selatan serta Amerika merupakan aliansi yang unik, dengan berbagai pasang surut aliansi yang terjadi pada negara-negara tersebut.

Dari uraian di atas, dari segi aliansi triteral antara Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan, terdapat beberapa tantangan utama yang nantinya akan mengganggu aliansi ketiga negara ini. Tantangan pertama adalah kebangkitan China. Salah satu fokus yang menjadi tantangan aliansi militer Amerika Serikat dan Korea

Selatan serta Jepang adalah kebangkitan China, baik secara ekonomi maupun militer. Harus diakui tantangan dari aliansi ketiga negara tersebut tentu bukan tanpa alasan. Adanya kebangkitan China merupakan hal yang harus diperhatikan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan serta Jepang sebagai salah satu faktor yang akan membuat aliansi kedua negara ini sedikit terganggu kedepannya.

Tantangan yang kedua datang dari internal aliansi teritorial itu sendiri, dimana dari internal pihak Korea Selatan yang masih sulit untuk menerima dan memperbaiki serta melupakan kejadian masa lalu yang menimpa mereka. Tantangan yang ketiga adalah penyelesaian kasus nuklir Korea Utara. Program pengembangan senjata nuklir Korea Utara dinilai mampu mengancam ketentraman dan stabilitas keamanan negara-negara internasional terutama Korea Selatan dan Jepang yang secara geografis berdekatan, hal ini dilandasi dengan perbincangan dari perwakilan Korea Utara kepada para pakar Amerika Serikat yang isinya, Korea Utara tidak lagi tertarik untuk menerima bantuan pangan Amerika Serikat sebagai imbalan untuk konsesi nuklir Korea Utara. Korea Utara juga mengatakan mereka akan mempertimbangkan kembali untuk mengakhiri bebas nuklir. Akan tetapi keberlanjutan *Six Party Talks* ini terus mengalami hambatan dan tak kunjung menemui titik terang. *Six Party Talks* dikatakan gagal karena Korea Utara masih mengembangkan nuklirnya dan melakukan serangkaian Uji coba nuklir yang dapat mengancam stabilitas kawasan maupun internasional. Adanya pengembangan nuklir dari Korea Utara ini semakin membuat aliansi Amerika Serikat, Korea Selatan serta Jepang akan terus berupaya agar kasus nuklir Korea Utara ini dapat diselesaikan tanpa harus dengan menggunakan kekuatan militer. Negosiasi dan diplomasi masih menjadi instrumen yang dinilai tepat untuk saat ini dan kedepannya untuk mendekati Korea Utara terkait kasus pengembangan nuklirnya.